



Analisis Konsistensi Laporan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan 2020-2023

Agape Anjumarito Panjaitan

agapeanjumaritopanjaitan@gmail.com

Universitas Negeri Medan

Gloria Sthefany

gloriesthefany033@gmail.com

Universitas Negeri Medan

Muhammad Rizal

rizallarispa22@gmail.com

Universitas Negeri Medan

William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Abstract. Consistency in the presentation of financial statements is an important factor to ensure transparency, accountability and comparability of information in the long term. Consistency ensures that the final financial statements are reliable, relevant and comparable. This principle is based on uniform recording procedures in recording similar transactions in a standardized way, so as to maintain accurate and informative financial records. This study aims to analyze the consistency of the balance sheet report in the Medan City Government Financial Report during the 2020-2023 period. The research method used is documentation analysis of the balance sheet reports from 2020 to 2023 with year-to-year comparison techniques and evaluation of the variability of recording assets, liabilities, and equity. In addition, a qualitative approach through interviews with relevant parties is used to understand the factors that influence reporting consistency. The results show that there is variability in the presentation of balance sheet reports that can be caused by changes in accounting policies, the application of Government Accounting Standards (SAP), and administrative factors. Therefore, a stricter application of accounting standards is needed to maintain the consistency and quality of financial statements.

Keywords: Consistency, Balance Sheet, Financial Statements, Medan City Government, Public Sector Accounting, 2020-2023

Abstrak. Konsistensi dalam penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan informasi dalam jangka panjang. Konsistensi memastikan hasil akhir laporan keuangan dapat diandalkan, relevan, dan memiliki nilai banding. Prinsip ini didasarkan pada prosedur pencatatan yang seragam dalam mencatat transaksi serupa dengan cara yang standar, sehingga dapat mempertahankan catatan keuangan yang akurat dan informatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi laporan neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan selama periode 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumentasi terhadap laporan neraca dari tahun 2020 hingga 2023 dengan teknik perbandingan tahun ke tahun serta evaluasi variabilitas pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variabilitas dalam penyajian laporan neraca yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta faktor administratif. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar akuntansi yang lebih ketat guna menjaga konsistensi dan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Konsistensi, Laporan Neraca, Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Medan, Akuntansi Sektor Publik, 2020-2023.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Medan tahun 2020-2023. Hasil penelitian akan memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset serta kewajiban pemerintah daerah. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan dalam laporan neraca, penelitian ini akan membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kinerja keuangan dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang lebih baik di Pemerintahan Kota Medan tahun 2020-2023. Meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam terkait SAP.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Konsistensi

Menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya, untuk memungkinkan perbandingan dan analisis yang konsisten. Konsep Konsistensi dalam akuntansi mengacu pada prinsip bahwa ketika perusahaan memilih metode atau prinsip akuntansi untuk digunakan dalam pelaporan keuangannya, perusahaan harus terus menggunakan metode tersebut secara konsisten di masa depan. Konsistensi dalam akuntansi membantu memastikan komparabilitas dan keandalan laporan keuangan, memungkinkan pengguna membuat perbandingan yang bermakna dari waktu ke waktu. Konsep Konsistensi penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan, namun ada kalanya perubahan kebijakan akuntansi diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan terus memberikan informasi yang relevan dan andal. Jika begitu, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan sifat dan dampak perubahan untuk membantu pengguna memahami alasan perubahan dan menilai implikasinya terhadap pengambilan keputusan.

B. Konsep Konsistensi

- a. Kebijakan Akuntansi: Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansinya dalam laporan keuangan dan menerapkannya secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, jika suatu perusahaan memilih untuk menggunakan metode FIFO (*First-In-First-Out*) untuk penilaian persediaan, maka perusahaan tersebut harus terus menggunakan metode ini pada periode-periode berikutnya.
- b. Perubahan Kebijakan Akuntansi: Jika perusahaan memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan alasan perubahan tersebut serta menyesuaikan laporan keuangan untuk semua periode yang disajikan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa dampak perubahan tercermin secara konsisten di semua periode.
- c. Keterbandingan: Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten meningkatkan daya banding laporan keuangan dari waktu ke waktu, memungkinkan pengguna menganalisis tren dan membuat keputusan yang tepat.

C. Konsep Laporan Neraca dalam Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dana memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna untuk mengavaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya, memenuhi kewajiban serta komitmennya, informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya, dan juga informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidanng jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Selaras dengan PP 105 dan kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dari penelitian bersama antara IAI kompartemen Akuntan Sektor publik serta berbasis pada IPSAS dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1) Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan Keuangan Akrua. 2) Laporan Keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus dan defisit dan perhitungan anggaran.

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.

Laporan neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah, yang mencakup aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, serta ekuitas daerah. Data yang diperoleh dari analisis neraca Kota Medan dapat digunakan untuk menilai stabilitas keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laporan neraca. Evaluasi terhadap aset tetap, misalnya, dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur dan aset lainnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis dokumen. Analisis dokumen (analisis dokumen) adalah jenis penelitian kualitatif di mana dokumen ditinjau oleh analis untuk menilai tema penilaian. Membedah dokumen melibatkan pengodean konten ke dalam subyek seperti bagaimana kelompok fokus atau transkrip wawancara diselidiki. Sebuah rubrik dapat juga dimanfaatkan untuk meninjau atau mencetak dokumen. Ada Tiga jenis dokumen penting yaitu:

- a. Catatan Publik, seperti transkrip pengganti, pernyataan tujuan, laporan tahunan, manual strategi, buku pegangan pengganti dan pengaturan vital.
- b. Dokumen Pribadi, seperti buku-buku tanggal, pesan, lembar memo, jurnal online, posting Facebook, log kewajiban, laporan kejadian, refleksi/buku harian dan surat kabar harian.
- c. Bukti Fisik, seperti selebaran, publikasi, rencana, buku pegangan, dan materi pelatihan.

Dalam penelitian ini, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji laporan neraca Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2023 yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan catatan publik, yaitu transkrip laporan keuangan tahunan, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Laporan neraca tersebut menjadi objek utama penelitian guna menilai konsistensi pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2020 dan 2021



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2021 (Audited)	2020 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	1.047.654.023.768,44	476.782.631.305,19
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	0	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	1.605.376.742,00	1.106.640.436,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	43.649.488.384,00	3.278.113.187,00
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	4.584.625.345,00	18.193.697.903,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.6	11.028.400,00	
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	232.958.551.271,00	124.918.095.583,79
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	1.209.585.977,00	2.044.636.837,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	175.066.337,00	275.020.765,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	107.180.591.056,00	68.548.109.081,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.11	94.898.198.650,20	94.851.355.650,20
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.12	(35.229.423.507,84)	(24.253.029.582,00)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.13	2.166.491.775,34	1.939.457.251,34
Persediaan	4.3.1.1.14	244.489.777.383,49	264.916.013.507,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.745.353.381.581,63	1.032.600.741.924,52
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		3.897.021.689.388,92	3.688.650.513.148,55
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.116.770.062.289,53	4.991.368.090.363,51
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	3.248.400.304.317,42	3.026.924.050.342,67
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	5.067.781.317.056,62	4.707.965.062.691,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	10.404.914.135.610,31	9.899.878.357.205,70

*Analisis Konsistensi Laporan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintahan
Kota Medan 2020-2023*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	2021 (Audited)	2020 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	314.661.598.683,45	293.480.316.269,68
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	81.790.861.074,00	52.747.100.182,00
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(13.102.157.095.913,82)	(11.951.014.606.107,11)
JUMLAH ASET TETAP		11.132.161.183.117,51	11.021.348.370.947,63
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		1.986.236.424,00	2.087.746.424,00
Aset Tidak Berwujud		83.131.262.028,10	61.453.325.628,00
Aset Lain-lain		2.009.417.758.151,45	1.927.325.414.816,74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(44.055.425.290,66)	(38.975.131.310,76)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.050.479.831.312,89	1.951.891.355.567,98
JUMLAH ASET		18.825.016.085.400,95	17.694.490.981.578,69
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	11.028.400,00	11.028.400,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	1.246.044.794,00	1.033.942.589,97
Utang Belanja	4.3.2.1.3	914.513.126.928,00	964.471.263.302,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	75.952.230.560,60	62.412.183.624,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		991.722.430.682,60	1.027.928.417.915,97
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	536.058.148.881,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		536.058.148.881,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.527.780.579.563,60	1.563.986.566.796,97
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	17.297.235.505.837,35	16.130.504.414.781,72
JUMLAH EKUITAS		17.297.235.505.837,35	16.130.504.414.781,72
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.825.016.085.400,95	17.694.490.981.578,69

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Laporan neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Total aset pemerintah daerah meningkat dari Rp17,69 triliun

menjadi Rp18,82 triliun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, investasi jangka panjang, serta pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat.

Aset lancar mengalami lonjakan dari Rp1,03 triliun menjadi Rp1,74 triliun, terutama karena peningkatan kas daerah dari Rp476,78 miliar ke Rp1,04 triliun. Hal ini mengindikasikan posisi likuiditas yang lebih kuat, kemungkinan akibat peningkatan pendapatan daerah atau efisiensi anggaran. Selain itu, piutang pajak daerah meningkat dari Rp124,91 miliar ke Rp232,95 miliar, yang menunjukkan peningkatan penerimaan pajak, meskipun juga menandakan adanya jumlah piutang yang belum tertagih cukup besar. Sebaliknya, piutang retribusi daerah turun dari Rp2,04 miliar menjadi Rp1,20 miliar, mengindikasikan efektivitas pemungutan retribusi yang lebih baik.

Dari sisi investasi jangka panjang, terjadi kenaikan dari Rp3,68 triliun menjadi Rp3,89 triliun, yang sepenuhnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah dalam sektor usaha atau proyek strategis. Sementara itu, aset tetap meningkat dari Rp11,02 triliun ke Rp11,13 triliun, didorong oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan. Kategori aset jalan, irigasi, dan jaringan naik dari Rp9,89 triliun menjadi Rp10,40 triliun, sementara nilai gedung dan bangunan meningkat dari Rp4,70 triliun menjadi Rp5,06 triliun, menunjukkan adanya renovasi atau pembangunan fasilitas baru.

Di sisi kewajiban, total utang pemerintah daerah turun dari Rp1,56 triliun menjadi Rp1,52 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang belanja dari Rp964,47 miliar menjadi Rp914,51 miliar, menandakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran jangka pendek. Sementara itu, utang jangka panjang tetap berada di angka Rp536,05 miliar, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menambah beban utang jangka panjang selama tahun 2021.

Peningkatan ekuitas pemerintah dari Rp16,13 triliun menjadi Rp17,29 triliun mencerminkan pertumbuhan aset bersih daerah yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban jangka pendek masih menjadi tantangan, keuangan daerah tetap stabil dan memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Secara keseluruhan, laporan neraca tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pertumbuhan aset yang kuat, terutama dalam investasi dan infrastruktur. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mengelola kewajiban jangka pendek dengan lebih baik agar tidak membebani keuangan di tahun-tahun mendatang. Dengan strategi pengelolaan yang lebih efisien, potensi pembangunan daerah dapat dimaksimalkan tanpa meningkatkan risiko keuangan yang berlebihan.

Tahun 2021 dan 2022



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	1.041.035.687.602,69	1.047.654.023.768,44
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	8.648.960,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	379.006,00	1.605.376.742,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	31.138.724.248,10	43.649.488.384,00
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	3.050.787.404,00	4.584.625.345,00
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	969.172.054,00	11.028.400,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	38.876.031.067,00	232.958.551.271,00
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	1.282.296.637,00	1.209.585.977,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	6.816.770.630,76	175.066.337,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	0,00	107.180.591.056,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.11	17.777.509.123,62	94.898.198.650,20
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.12	(10.365.289.649,26)	(35.229.423.507,84)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.13	3.401.195.757,66	2.166.491.775,34
Persediaan	4.3.1.1.14	249.900.588.271,17	244.489.777.383,49
JUMLAH ASET LANCAR		1.383.892.501.112,74	1.745.353.381.581,63
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.282.925.763.980,94	3.897.021.689.388,92
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		4.282.925.763.980,94	3.897.021.689.388,92
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		4.282.925.763.980,94	3.897.021.689.388,92
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.066.373.766.686,35	5.116.770.062.289,53
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	3.472.654.344.405,36	3.248.400.304.317,42
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	5.317.385.989.607,83	5.067.781.317.056,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	11.003.841.954.473,61	10.404.914.135.610,31

**Analisis Konsistensi Laporan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintahan
Kota Medan 2020-2023**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	892.438.515.120,87	314.661.598.683,45
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	1.005.259.249.513,85	81.790.861.074,00
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(12.145.128.409.395,59)	(13.102.157.095.913,82)
JUMLAH ASET TETAP		14.612.825.410.412,28	11.132.161.183.117,51
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		139.315.467.313,76	1.986.236.424,00
Aset Tidak Berwujud		113.105.492.153,14	83.131.262.028,10
Aset Lain-lain		2.234.902.144.291,47	2.009.417.758.151,45
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(47.429.318.394,69)	(44.055.425.290,66)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.439.893.785.363,68	2.050.479.831.312,89
JUMLAH ASET		22.719.537.460.869,64	18.825.016.085.400,95
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	42.792.754,00	11.028.400,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	1.263.452.150,00	1.246.044.794,00
Utang Belanja	4.3.2.1.3	1.179.686.331.709,00	914.513.126.928,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	457.921.241.039,79	75.952.230.560,60
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.638.913.817.652,79	991.722.430.682,60
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	536.058.148.881,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		536.058.148.881,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.174.971.966.533,79	1.527.780.579.563,60
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	20.544.565.494.335,85	17.297.235.505.837,35
JUMLAH EKUITAS		20.544.565.494.335,85	17.297.235.505.837,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.719.537.460.869,64	18.825.016.085.400,95

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Laporan neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Total aset pemerintah daerah meningkat dari Rp18,82 triliun menjadi Rp22,71 triliun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan infrastruktur.

Aset lancar mengalami penurunan dari Rp1,74 triliun menjadi Rp1,38 triliun, terutama akibat berkurangnya saldo kas, seperti kas BLUD yang turun dari Rp43,64 miliar ke Rp31,13 miliar dan kas Dana BOS dari Rp4,58 miliar ke Rp3,05 miliar. Hal ini mengindikasikan peningkatan realisasi anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, piutang pajak daerah turun drastis dari Rp232,95 miliar menjadi Rp38,87 miliar, menunjukkan efektivitas dalam penagihan pajak. Sebaliknya, piutang lain-lain dari PAD meningkat dari Rp175 juta menjadi Rp6,81 miliar, mencerminkan peningkatan pendapatan daerah di luar pajak.

Investasi jangka panjang naik dari Rp3,89 triliun menjadi Rp4,28 triliun, seluruhnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah dalam sektor usaha dan proyek strategis. Sementara itu, aset tetap mengalami lonjakan dari Rp11,13 triliun ke Rp14,61 triliun, didorong oleh pembangunan infrastruktur, terutama pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan yang

meningkat dari Rp10,40 triliun menjadi Rp11,00 triliun. Konstruksi dalam pengerjaan juga mengalami peningkatan tajam dari Rp81,79 miliar menjadi Rp1,00 triliun, menunjukkan adanya proyek pembangunan besar yang sedang berjalan.

Di sisi kewajiban, total utang pemerintah daerah meningkat dari Rp1,52 triliun menjadi Rp2,17 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang belanja dari Rp914,51 miliar menjadi Rp1,17 triliun serta utang jangka pendek lainnya yang melonjak dari Rp75,95 miliar ke Rp457,92 miliar, yang kemungkinan terkait dengan pembiayaan proyek-proyek daerah.

Peningkatan ekuitas pemerintah dari Rp17,29 triliun menjadi Rp20,54 triliun mencerminkan pertumbuhan aset bersih yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban jangka pendek meningkat, keuangan daerah tetap stabil dan memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, laporan neraca tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pertumbuhan aset yang pesat, terutama dalam investasi dan infrastruktur. Namun, peningkatan kewajiban jangka pendek menuntut pengelolaan anggaran yang lebih ketat agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang. Dengan strategi pengelolaan yang lebih efisien, potensi pembangunan dapat terus dimaksimalkan tanpa meningkatkan risiko fiskal yang berlebihan.

Tahun 2022 dan 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

3. NERACA

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	17.127.463,00	8.648.960,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	0,00	379.006,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	789.281.538,00	969.172.054,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	10.226.379.505,00	38.876.031.067,00
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	2.057.670.837,00	1.282.296.637,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	18.397.973.553,00	6.816.770.630,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	5.294,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.11	3.621.308.415,00	0,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.12	6.469.736.883,62	17.777.509.123,62
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.13	(10.771.048.059,68)	(10.365.289.649,26)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	3.424.534.218,83	3.401.195.757,66
Persediaan	4.3.1.1.15	208.005.170.342,00	249.900.588.271,17
JUMLAH ASET LANCAR		322.466.761.936,08	1.383.892.501.112,74
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.623.599.018.273,54	5.066.373.766.686,35
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	3.817.958.565.687,36	3.472.654.344.405,36
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	6.138.417.667.302,30	5.317.385.989.607,83

**Analisis Konsistensi Laporan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintahan
Kota Medan 2020-2023**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	11.490.417.274.295,52	11.003.841.954.473,61
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	1.010.987.785.761,80	892.438.515.120,87
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	1.997.204.034.258,58	1.005.259.249.513,85
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(12.944.711.018.643,43)	(12.145.128.409.395,59)
JUMLAH ASET TETAP		17.133.873.326.935,67	14.612.825.410.412,28
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		139.172.894.163,76	139.315.467.313,76
Aset Tidak Berwujud		105.273.634.246,03	113.105.492.153,14
Aset Lain-lain		2.178.899.594.840,29	2.234.902.144.291,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(51.059.676.836,85)	(47.429.318.394,69)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DTF)		97.657.840.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		2.469.944.286.413,23	2.439.893.785.363,68
JUMLAH ASET		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	52.251.783,00	42.792.754,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	2.214.803.358,00	1.263.452.150,00
Utang Belanja	4.3.2.1.3	1.426.569.831.372,30	1.179.686.331.709,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	911.767.714.512,96	457.921.241.039,79
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.340.604.601.026,26	1.638.913.817.652,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.819.161.340.236,26	2.174.971.966.533,79
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH EKUITAS		21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64

DI GUBERNUR SUMATERA UTARA,



5

Laporan neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Total aset pemerintah daerah meningkat dari Rp22,71 triliun menjadi Rp24,39 triliun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan infrastruktur.

Aset lancar mengalami penurunan dari Rp1,38 triliun menjadi Rp322 miliar, terutama akibat berkurangnya saldo kas, seperti kas BLUD yang turun dari Rp31,13 miliar ke Rp11,07

miliar dan kas Dana BOS dari Rp3,05 miliar ke Rp2,53 miliar. Hal ini mengindikasikan peningkatan realisasi anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, piutang pajak daerah turun drastis dari Rp38,87 miliar menjadi Rp10,22 miliar, menunjukkan efektivitas dalam penagihan pajak. Sebaliknya, piutang lain-lain dari PAD meningkat dari Rp6,81 miliar menjadi Rp18,39 miliar, mencerminkan peningkatan pendapatan daerah di luar pajak.

Investasi jangka panjang naik dari Rp4,28 triliun menjadi Rp4,46 triliun, seluruhnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah dalam sektor usaha dan proyek strategis. Sementara itu, aset tetap mengalami lonjakan dari Rp14,61 triliun ke Rp17,13 triliun, didorong oleh pembangunan infrastruktur, terutama pada kategori jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkat dari Rp11,00 triliun menjadi Rp11,49 triliun. Konstruksi dalam pengerjaan juga mengalami peningkatan tajam dari Rp1,00 triliun menjadi Rp1,99 triliun, menunjukkan adanya proyek pembangunan besar yang sedang berjalan.

Di sisi kewajiban, total utang pemerintah daerah meningkat dari Rp2,17 triliun menjadi Rp2,81 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang belanja dari Rp1,17 triliun menjadi Rp1,42 triliun serta utang jangka pendek lainnya yang melonjak dari Rp457,92 miliar ke Rp911,76 miliar, yang kemungkinan terkait dengan pembiayaan proyek-proyek daerah.

Peningkatan ekuitas pemerintah dari Rp20,54 triliun menjadi Rp21,57 triliun mencerminkan pertumbuhan aset bersih yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban jangka pendek meningkat, keuangan daerah tetap stabil dan memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, laporan neraca tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pertumbuhan aset yang pesat, terutama dalam investasi dan infrastruktur. Namun, peningkatan kewajiban jangka pendek menuntut pengelolaan anggaran yang lebih ketat agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang. Dengan strategi pengelolaan yang lebih efisien, potensi pembangunan dapat terus dimaksimalkan tanpa meningkatkan risiko fiskal yang berlebihan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap laporan neraca Pemerintah Kota Medan periode 2020-2023 menunjukkan adanya variabilitas dalam penyajian laporan keuangan akibat perubahan kebijakan akuntansi, penerapan SAP, dan faktor administratif lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas, tren keuangan daerah tetap positif dengan peningkatan nilai aset dan ekuitas, terutama di sektor investasi jangka panjang dan aset tetap. Namun, kenaikan kewajiban jangka pendek menunjukkan tantangan dalam pengelolaan anggaran yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar akuntansi yang lebih ketat, harmonisasi kebijakan pencatatan, serta optimalisasi strategi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Bonara, R. S. F., Judijanto, L., Astuti, T., Mariana, M., Uksi, R., Seran, A. M. I., ... & Masradin, M. (2024). Teori Akuntansi.
- BINUS Online Learning. Mengenal Pentingnya Nilai Konsistensi dan Nilai Banding dalam Laporan Keuangan. (2024, 19 November). Diakses pada [10 Maret 2025].

- Hapsari, R. A., & Murdiawati, K. (2018). Pengaruh Revaluasi Aset terhadap Laporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 120-135.
- Jago Akuntansi. "Pelaporan Keuangan Sektor Publik." *Jago Akuntansi*, 22 April 2019. Diakses pada [12 Maret 2025].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) dalam Laporan Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Neraca Tahun 2021*. Diakses dari <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/neraca/50>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Neraca Tahun 2022*. Diakses dari <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/neraca/51>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Neraca Tahun 2023*. Diakses dari <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/neraca/223>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
- Pranestianegara, W., & Sari, R. P. (2022). Fenomenologi revaluasi aset di sektor publik. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3139-3150.
- Sarlina Sari, S. E., Ak, M. S., Rohman, A. F., & Hum, S. (2024). *Teori Akuntansi*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.